

## **GEMA MADANI SEBAGAI KEBIJAKAN PUBLIK YANG PARTISIPATIF DI KOTA TASIKMALAYA**

**Ani Heryani**

Program Magister Ilmu Administrasi

STIA YPPT Priatim Tasikmalaya

Email: [aniheryani248@gmail.com](mailto:aniheryani248@gmail.com)

**Abstract:** Community service carried out in the City of Tasikmalaya has the purpose of providing an understanding to the public related to the implementation of Tasikmalaya Mayor Regulation Number 8 of 2016 concerning Implementation of Independent Guidelines, Competitive and Innovative Community Movement Programs in the City of Tasikmalaya and Mayor Regulation No. 3 of 2017 concerning Amendments to Regulations Mayor of Tasikmalaya Number 8 of 2016 concerning Guidelines for the Implementation of Independent, Competitive and Innovative Community Movement Programs in the City of Tasikmalaya. The results of this activity were an increase in the knowledge, understanding and motivation of the community to implement the Gema Madani Program and find appropriate assistance patterns related to community empowerment in the context of implementing the Gema Madani Program.

**Keywords:** Implementation, community empowerment.

**Abstrak :** Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Kota Tasikmalaya memiliki tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan implementasi Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing dan Inovatif di Kota Tasikmalaya dan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing dan Inovatif di Kota Tasikmalaya. Hasil dari kegiatan ini adalah adanya peningkatan pengetahuan, pemahaman dan motivasi dari masyarakat untuk melaksanakan Program Gema Madani dan menemukan pola pendampingan yang tepat terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pelaksanaan Program Gema Madani.

**Kata kunci :** Implementasi, pemberdayaan masyarakat.

### **PENDAHULUAN**

Gerakan pemberdayaan masyarakat di berbagai kota/kabupaten sangat variatif. Program pemberdayaan yang ada disesuaikan dengan kondisi actual di Kota/Kabupaten tersebut. Sebagaimana yang ada di Kota Tasikmalaya, Program Pemberdayaan Masyarakat yang ada di sebut dengan Gema Madani. Program Gerakan Masyarakat Mandiri, Berdaya

Saing dan Inovatif (Gema Madani) di Kota Tasikmalaya ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing dan Inovatif di Kota Tasikmalaya dan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Program Gerakan Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing dan Inovatif di Kota Tasikmalaya. Secara kelembagaan Program Pemberdayaan Gema Madani yang semula dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan secara teknis oleh LPM Kelurahan saat ini secara Tupoksi berada di Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya dan secara teknis dikelola oleh Tim Pengelola Kegiatan. Partisipasi masyarakat cenderung menurun terutama pada tahapan implementasi dan evaluasi program. Permasalahan kompleks yang dihadapi publik mendorong adanya respon strategis yang menjamin tercapainya produk kebijakan yang berkualitas yang mampu memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat.

Namun, pemerintah dihadapkan pada situasi keterbatasan sumber daya di satu sisi dan masalah-masalah publik yang makin kompleks di sisi yang lain, maka pemerintah tidak mungkin menyelesaikan masalah-masalah tersebut secara bersamaan. Permasalahan yang dihadapi Gema Madani di Kota Tasikmalaya antara lain respon dari masyarakat yang variatif terhadap program tersebut. Umumnya masyarakat yang berada di lingkungan yang secara sosiologis heterogen dan sangat dinamis. Pemberdayaan ekonomi baru terbatas pada peningkatan produksi bagi beberapa usaha kecil sudah dikelola oleh masyarakat, belum dapat menciptakan usaha baru yang nantinya akan menjadi usaha produktif yang dimiliki masyarakat, padahal potensi untuk mengembangkan usaha baru terbuka sangat lebar, misalnya produksi kerajinan anyaman masih terbatas pada pengembangan usaha anyaman yang ada yaitu dengan peningkatan jumlah produksi belum dapat meningkatkan jenis produksi tersebut. Bahan baku yang mudah didapatkan dan melimpah baru dapat ditunjang oleh keterampilan yang dimiliki masyarakat secara turun temurun menyebabkan usaha kecil kerajinan belum dapat menyerap

tenaga kerja cukup banyak.

Pola kemitraan dengan dinas-dinas terkait dan dengan pihak pengusaha belum berjalan secara optimal, menyebabkan sulitnya pengembangan kelompok penerima manfaat Gema Madani memperoleh mitra dalam peningkatan produksi maupun pemasarannya. Permasalahan kompleks yang dihadapi publik mendorong adanya respon strategis yang menjamin tercapainya produk kebijakan yang berkualitas yang mampu memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat. Namun, pemerintah dihadapkan pada situasi keterbatasan sumber daya di satu sisi dan masalah-masalah publik yang makin kompleks di sisi yang lain, maka pemerintah tidak mungkin menyelesaikan masalah-masalah tersebut secara bersamaan.

## **METODE**

Dari permasalahan tersebut di atas, dilakukan analisis terhadap kebijakan Gema Madani, yaitu analisis terhadap Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing dan Inovatif di Kota Tasikmalaya dan telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing dan Inovatif di Kota Tasikmalaya. Analisis dilakukan terhadap kebijakan, pelaksana, kelompok sasaran dan faktor lingkungan.

## **PEMBAHASAN**

Program Gerakan Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing dan Inovatif (Gema Madani) ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pedoman Pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing dan Inovatif di Kota Tasikmalaya dan telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing dan Inovatif di Kota Tasikmalaya. Berdasarkan Peraturan Walikota tersebut, Program Gerakan Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing dan Inovatif di Kota Tasikmalaya, yang selanjutnya disebut Program Gema Madani adalah program pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh lembaga kemasyarakatan dengan tujuan untuk memberdayakan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun bidang yang menjadi sasaran dari Program Gema Madani adalah bidang pengembangan ekonomi dan koperasi, bidang pembangunan infrastruktur dan bidang sosial kemasyarakatan. Bidang pengembangan ekonomi dan koperasi memiliki porsi yang sangat besar dalam program pemberdayaan masyarakat ini.

Untuk melaksanakan suatu kebijakan perlu ada interpretasi terhadap kebijakan yang dimaksud. Grindle (dalam Ekowati, 2005 : 24) mengemukakan bahwa "Kebijakan publik merupakan suatu pernyataan yang luas meliputi cita-cita (*goals*), tujuan (*objectives*) dan cara mewujudkannya melalui program".

Wujud dari aktivitas interpretasi kebijakan adalah menjabarkan sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang bersifat operasional berupa program-program. Tujuan kebijakan akan tercapai apabila program-program dilaksanakan secara berkesinambungan. Kontinuitas program merupakan suatu alat ukur untuk melihat keberhasilan implementasi kebijakan.

Ekowati (2005 : 25) menyebutkan bahwa : "Implementasi kebijakan tergantung pada implementasi program yang berkesinambungan". Indikator-indikator pembentuk kebijakan yang ideal (*The Idealized Policy*) menunjukkan bahwa Program Gema Madani dapat diimplementasikan dengan mewujudkannya melalui program-program yang berkesinambungan. Program-program yang dilakukan membawa konsekuensi logis kepada perubahan tatanan kehidupan pemerintahan, pelayanan masyarakat, maupun kebijakan pembangunan strategis yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kota Tasikmalaya agar kebijakan Program Gema Madani ini menjadi kebijakan yang ideal antara lain dilakukan dengan menempuh langkah-langkah strategis maupun operasional untuk mewujudkan kebijakan menjadi partisipatif dan program tersebut menjadi kenyataan, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Implementasi merupakan suatu kegiatan untuk menimbulkan hasil (*output*), dampak (*outcome*) dan manfaat (*benefit*) serta dampak (*impact*) yang dapat dinikmati oleh kelompok sasaran (*target group*). Islamy (2003 : 119) mengemukakan bahwa kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan akan membawa dampak tertentu terhadap kelompok sasaran, baik positif (*intended*) maupun negatif (*unintended*).

Kebijakan Program Gema Madani diimplementasikan agar mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satu tujuan dari program pemberdayaan ini adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Penggunaan musyawarah perencanaan pembangunan partisipatif telah memberikan ruang positif bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan. Stakeholders yang terlibat

antara lain masyarakat secara umum, pengusaha dan perguruan tinggi.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat terkait dengan Program Gema Madani di Kota Tasikmalaya menghasilkan beberapa kegiatan antara lain :

1. Bekerjasama dengan Tim Pengelola Program menyampaikan sosialisasi kepada Tim Pengelola Kegiatan tingkat Kelurahan di tingkat Kelurahan mengenai Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing dan Inovatif di Kota Tasikmalaya dan telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing dan Inovatif di Kota Tasikmalaya.
2. Bekerjasama dengan Tim Pengelola Kegiatan menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Program Gema Madani
3. Menjajagi adanya pendampingan masyarakat penerima manfaat program Gema Madani

Pola pendampingan yang akan dilakukan harus dilakukan dengan mengkaji kondisi sosiologis masyarakat. Penyuluhan partisipatif pada kenyataannya dapat mendorong dan memberi ruang selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk melakukan inisiatif dan partisipasi social, namun ada kecenderungan jika masyarakat didorong-dorong untuk mengikuti arahan pemerintah, akan berdampak melemahnya partisipasi masyarakat, dan lemahnya sikap kritis kepada pemerintah. Pendekatan yang keliru bisa berakibat kurangnya motivasi dan daya dorong masyarakat untuk ikut terlibat dalam melakukan prakarsa, perencanaan, memberikan usul, merumuskan, memperdebatkan, dan mengevaluasi serta melakukan pengawasan terhadap

kebijakan publik, di tingkat pusat ataupun lokal.

## **SIMPULAN**

Dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilakukan, mendapat respon yang positif baik dari Tim Pengelola Program Gema Madani maupun dari masyarakat. Dan adanya peningkatan pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai Program Gema Madani. Kegiatan ini menjadi kegiatan yang berkelanjutan untuk pengabdian masyarakat pada periode berikutnya mengingat perlu adanya pendampingan terhadap kelompok masyarakat penerima manfaat sebagai realisasi dari program.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Dye, Thomas R. 2002. *Understanding Public Policy*. New Jersey : Prentice Hall, Englewood Cliffs.
- Ekowati, Mas Roro Lilik. 2005. *Perencanaan, Implementasi & Evaluasi Kebijakan Atau Program (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis)*. Surakarta : Pustaka Cakra.
- Grindle, Merilee S. and JW. Thomas, 1991. *Public Choice and Policy Change*. Baltimore : The John Hopkins University Press.
- Jones, Charles O. 1996. *An Introduction to the Study of Public Policy*, Wads Worth, Inc.
- Islamy, Irfan, M. 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Quade, ES, 1977. *Analysis for Public Decision*. New York : Longma